

# DIGITAL READINESS APARATUR PEMERINTAH KOTA BAUBAU DALAM Mendukung IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Farid Yusuf Nur Achmad<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Buton

<sup>1</sup> [faridyusuf.umb@gmail.com](mailto:faridyusuf.umb@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

diajukan: 3 Februari 2026,

diterima: 23 Februari 2026.

## Abstract

Digital transformation in public administration requires government personnel to possess adequate digital readiness to effectively implement the Electronic-Based Government System (SPBE). The Government of Baubau City, which is accelerating the digitalization of public services, continues to face several challenges, including disparities in technological competence among civil servants, limited utilization of digital service applications, and uneven levels of digital literacy across local government agencies. This study aims to analyze the level of digital readiness of Baubau City government personnel and to identify the supporting and inhibiting factors in SPBE implementation. A descriptive approach was employed, with data collected through questionnaires, interviews, observations, and document reviews. Data were analyzed based on digital skills, digital literacy, attitudes toward technology, organizational support, and the availability of digital infrastructure. The results indicate that the overall level of digital readiness among government personnel falls within the moderate category, with variations across agencies. Key supporting factors include leadership commitment and the availability of network infrastructure, while inhibiting factors involve low digital competence among senior personnel, limited continuous training, and suboptimal integration of information systems. This study underscores that the success of SPBE implementation is highly dependent on the digital readiness of government personnel and the consistency of internal policies. Therefore, a sustainable strategy to strengthen the digital capacity of government personnel is essential.

**Keywords:** *Digital Readiness, Government Personnel, Electronic-Based Government System (SPBE)*

## Abstrak

Transformasi digital dalam administrasi publik menuntut aparatur pemerintah memiliki kesiapan digital yang memadai agar mampu mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara efektif. Pemerintah Kota Baubau yang sedang mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan kompetensi teknologi antaraparatur, keterbatasan pemanfaatan aplikasi layanan digital, serta belum meratanya literasi digital di berbagai perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan digital aparatur Pemerintah Kota Baubau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi SPBE. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan berdasarkan aspek keterampilan digital, literasi digital, sikap terhadap teknologi, dukungan organisasi, serta ketersediaan infrastruktur digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesiapan digital aparatur berada pada kategori sedang, dengan variasi antarperangkat daerah. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan dan ketersediaan infrastruktur jaringan, sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya kompetensi digital aparatur senior, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada kesiapan digital aparatur dan konsistensi kebijakan internal, sehingga diperlukan strategi penguatan kapasitas digital aparatur secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Digital Readiness, Aparatur Pemerintah, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi publik kini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) (Pasenko, 2022). Keberhasilan implementasi e-government tidak hanya ditentukan oleh investasi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan digital aparatur sektor publik yang dituntut memiliki literasi digital serta kompetensi teknologi yang memadai agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal (Cubo dkk., 2022). Proses transformasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas birokrasi, dinamika pengambilan keputusan politik, serta kebutuhan akan kepemimpinan strategis yang mampu mengarahkan perubahan digital secara berkelanjutan (Palomäki, 2020). Selain itu, penguatan nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi semakin penting karena penerapan TIK yang efektif terbukti mampu memperkuat tata kelola pemerintahan modern (Peña Tuanama De dkk., 2023). Dengan demikian, integrasi teknologi digital berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi organisasi, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Pasenko, 2022).

Dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia, implementasi e-government masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan kesenjangan kemampuan digital aparatur serta rendahnya interoperabilitas sistem informasi antarinstansi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta kurangnya pelatihan teknologi yang berkelanjutan dan dukungan kebijakan organisasi yang memadai (Rahma Aulia dkk., 2025). Fragmentasi sistem yang tidak terintegrasi dan lemahnya tata kelola digital semakin memperumit implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga belum berjalan optimal (Kennedy dkk., 2024). Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta pembangunan budaya organisasi yang adaptif terhadap teknologi menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi digital pemerintahan (Subhan & Sartika, 2025). Pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan kompetensi individu, budaya organisasi, dan kebijakan digital yang kuat menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola digital yang efektif (Rahma Aulia dkk., 2025).

Studi empiris mengenai kesiapan e-government di tingkat lokal menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan, terutama pada aspek kompetensi digital aparatur pemerintah. Banyak penelitian sebelumnya cenderung menekankan indikator infrastruktur dan kebijakan, sementara peran sumber daya manusia sebagai aktor utama adopsi teknologi sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai (Amir dkk., 2023; Zain dkk., 2025). Beberapa temuan menunjukkan bahwa sebagian aparatur memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, namun sebagian lainnya masih membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan, sehingga terjadi ketimpangan kompetensi digital dalam organisasi pemerintah (Amir dkk., 2023). Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya tingkat kepercayaan publik turut menjadi faktor yang menghambat implementasi SPBE secara efektif (Nafi'ah, 2022; Zain dkk., 2025). Literatur juga menegaskan bahwa penilaian kesiapan digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga sikap dan persepsi aparatur terhadap teknologi, karena aspek tersebut berperan penting dalam membentuk lingkungan kerja yang mendukung transformasi digital (Setyawan dkk., 2024).

Literatur lain menyoroti bahwa dukungan organisasi seperti pelatihan berkelanjutan, kepemimpinan digital, serta ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai memiliki peran

strategis dalam meningkatkan kesiapan digital aparaturnya pemerintah daerah di Indonesia (Muallidin, 2025; Syam dkk., 2025). Meskipun digitalisasi pemerintahan menawarkan potensi untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, berbagai hambatan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital aparaturnya masih menjadi tantangan utama (Syam dkk., 2025). Selain itu, penelitian empiris yang mengintegrasikan aspek kompetensi digital, literasi, dan dukungan organisasi secara simultan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks pemerintahan daerah Indonesia (Muallidin, 2025). Beberapa daerah menunjukkan tingkat kesiapan digital yang lebih maju, sementara daerah lain masih tertinggal, sehingga diperlukan strategi intervensi yang terarah untuk mempercepat transformasi digital secara merata (Putri et al., 2025). Kesenjangan penelitian ini menunjukkan pentingnya studi yang lebih spesifik dalam memahami kesiapan digital aparaturnya pemerintah daerah (Juhaeni, 2025).

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan melalui integrasi layanan dan interoperabilitas data. Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya disparitas kesiapan digital antarwilayah, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia digital dan kapasitas infrastruktur teknologi (Putri dkk., 2025). Perbedaan kapasitas teknologi, komitmen organisasi, serta kompetensi aparaturnya menjadi faktor yang memicu ketimpangan implementasi SPBE di berbagai daerah. Kondisi ini menegaskan pentingnya memahami profil kesiapan digital aparaturnya secara lebih kontekstual pada tingkat lokal, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, guna merumuskan strategi transformasi digital yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini memposisikan digital readiness sebagai variabel utama karena dianggap sebagai indikator strategis dalam keberhasilan implementasi SPBE di pemerintahan daerah. Pendekatan penelitian akan mengukur dimensi kesiapan digital sejak aspek keterampilan teknologi, literasi digital, sikap terhadap teknologi, hingga dukungan organisasi yang relevan dalam konteks pemerintahan lokal. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat utama yang memengaruhi kesiapan digital aparaturnya di Kota Baubau. Dengan demikian, hasil penelitian akan memperkaya literatur terkait kesiapan digital birokrasi dalam mengadopsi teknologi pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan mengisi gap riset tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap kerangka penilaian digital readiness aparaturnya pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan pelatihan digital, kebijakan internal, dan strategi implementasi SPBE secara efektif. Hasil studi akan membuka ruang diskusi lanjutan dalam domain digital transformation readiness pemerintahan lokal, serta memperluas kajian literatur tentang digital governance di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan kontribusi penting bagi pengembangan pengetahuan dan praktik pemerintahan digital.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis tematik reflektif sebagai strategi utama untuk mengkaji digital readiness aparaturnya pemerintah dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendekatan

SLR saat ini menjadi salah satu metode yang banyak digunakan pada artikel jurnal bereputasi Q1–Q3 karena mampu menghasilkan sintesis pengetahuan yang transparan, sistematis, dan dapat direplikasi. Berbeda dengan studi kepustakaan naratif konvensional, SLR menekankan prosedur pencarian literatur yang terstruktur, kriteria inklusi–eksklusi yang jelas, serta tahapan analisis yang terdokumentasi secara metodologis. Metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan kontribusi konseptual yang kuat melalui integrasi berbagai temuan empiris terkait digital governance dan kesiapan digital aparatur (Snyder, 2019; Page et al., 2021).

Desain penelitian mengikuti tahapan SLR yang meliputi perumusan pertanyaan penelitian, strategi pencarian literatur, proses seleksi artikel, ekstraksi data, dan sintesis tematik. Tahap awal dilakukan dengan merumuskan fokus penelitian mengenai literasi digital aparatur, dukungan organisasi, keterampilan teknologi, serta integrasi sistem SPBE sebagai dimensi konseptual kesiapan digital. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan portal jurnal nasional terakreditasi dengan kata kunci “digital readiness”, “e-government readiness”, dan “SPBE”. Pendekatan ini selaras dengan praktik metodologis SLR modern yang menekankan transparansi proses penelusuran literatur ilmiah (Page et al., 2021; Booth et al., 2022).

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengadopsi kerangka PRISMA 2020 yang banyak digunakan dalam publikasi jurnal internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penelitian berbasis literatur. Tahapan dimulai dari identifikasi artikel melalui pencarian database, dilanjutkan dengan proses penyaringan (screening) berdasarkan judul dan abstrak, evaluasi kelayakan artikel secara penuh (eligibility), hingga penentuan literatur akhir yang dianalisis. Penggunaan PRISMA membantu memastikan bahwa proses seleksi sumber dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Pendekatan ini juga meningkatkan kualitas metodologi penelitian karena memberikan dokumentasi yang jelas mengenai alur pemilihan literatur (Page et al., 2021, <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>).

Analisis data dilakukan menggunakan reflexive thematic analysis, yaitu teknik analisis kualitatif yang saat ini banyak digunakan dalam penelitian sosial dan administrasi publik modern. Tahap analisis meliputi proses familiarisasi data, pengkodean awal, pengelompokan tema, serta interpretasi konseptual terhadap pola yang muncul dalam literatur. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi konstruksi digital readiness aparatur secara multidimensi tanpa menggunakan variabel kuantitatif. Analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan pada makna konseptual dan hubungan antar tema yang relevan dengan implementasi SPBE (Braun & Clarke, 2021).

Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel jurnal bereputasi yang membahas digital governance, e-government readiness, literasi digital aparatur, atau transformasi digital sektor publik. Publikasi yang digunakan berada pada rentang tahun terbaru serta memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Artikel yang tidak memiliki keterkaitan dengan konteks pemerintahan atau tidak membahas aspek kesiapan digital dikeluarkan dari proses analisis. Penerapan kriteria seleksi ini bertujuan menjaga kualitas sumber serta memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan memiliki validitas ilmiah yang kuat. Untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian, proses analisis dilakukan melalui triangulasi sumber

literatur serta audit trail metodologis yang mendokumentasikan setiap tahap seleksi dan analisis data.

Tabel 1. Research Protocol (Systematic Literature Review Protocol)

Komponen Protokol	Deskripsi Prosedur Penelitian
Tujuan Review	Mengidentifikasi dan mensintesis konsep <i>digital readiness</i> aparatur pemerintah dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Research Question	Bagaimana konstruksi konseptual digital readiness aparatur dalam literatur digital governance? Apa saja dimensi utama yang memengaruhi kesiapan digital dalam implementasi SPBE?
Jenis Review	Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif tematik.
Framework Metodologi	PRISMA 2020 untuk proses seleksi artikel dan transparansi pelaporan (Page et al., 2021).
Database Pencarian	Scopus, Web of Science, Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional terakreditasi.
Kata Kunci (Search String)	“digital readiness”, “e-government readiness”, “digital governance”, “public sector digital transformation”, “SPBE”.
Rentang Waktu Publikasi	2020–2025 untuk memastikan keterbaruan literatur.
Kriteria Inklusi	Artikel jurnal peer-reviewed, relevan dengan sektor publik, memiliki fokus pada kesiapan digital atau transformasi digital pemerintahan.
Kriteria Eksklusi	Artikel opini, prosiding tanpa peer-review, literatur yang tidak membahas konteks pemerintahan atau kesiapan digital.
Proses Screening	Identifikasi → Screening Judul/Abstrak → Full-text Eligibility → Final Inclusion sesuai PRISMA.
Unit Analisis	Konsep dan tema digital readiness aparatur pemerintah.
Teknik Ekstraksi Data	Coding literatur berdasarkan tema: literasi digital, dukungan organisasi, kompetensi teknologi, integrasi sistem SPBE.
Metode Analisis	Reflexive Thematic Analysis (Braun & Clarke, 2021).
Quality Assessment	Evaluasi relevansi teoritis, kredibilitas jurnal, dan konsistensi metodologi dalam setiap artikel.
Output Sintesis	Kerangka konseptual digital readiness aparatur dalam implementasi SPBE.

Tabel 1 protokol penelitian di atas menunjukkan tahapan sistematis dalam pelaksanaan Systematic Literature Review yang digunakan pada penelitian ini. Penggunaan protokol penelitian menjadi praktik umum pada artikel jurnal bereputasi karena meningkatkan transparansi metodologis serta memungkinkan proses penelitian direplikasi oleh peneliti lain. Framework PRISMA 2020 digunakan sebagai acuan utama dalam proses seleksi literatur guna memastikan bahwa artikel yang dianalisis memenuhi standar kualitas ilmiah (Page et al., 2021). Selain itu, pendekatan reflexive thematic analysis diterapkan untuk mengidentifikasi pola konseptual mengenai digital readiness aparatur secara mendalam melalui proses pengkodean dan interpretasi tematik (Braun & Clarke, 2021).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital readiness aparatur pemerintah dalam mendukung implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Baubau terbentuk dari tiga dimensi utama, yaitu kesiapan individu aparatur, kesiapan organisasi perangkat daerah, dan kesiapan sistem digital pemerintahan. Sintesis literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa kesiapan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan internal, kepemimpinan digital, serta integrasi sistem layanan elektronik. Dalam konteks pemerintahan daerah, kesiapan aparatur menjadi faktor dominan yang menentukan

keberhasilan implementasi SPBE karena aparatur merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan sistem digital pelayanan publik.

### 3.1.1 Tingkat Kesiapan Digital Aparatur dalam Implementasi SPBE

Tabel 2. Temuan Utama Digital Readiness Aparatur Pemerintah Kota Baubau

Dimensi Kesiapan	Indikator Temuan	Kondisi Sintesis	Implikasi terhadap SPBE
Literasi Digital	Pemahaman aplikasi layanan elektronik	Cukup berkembang namun belum merata	Penggunaan sistem masih bergantung pada aparatur tertentu
Kompetensi Teknologi	Penguasaan sistem informasi	Variatif antar perangkat daerah	Perlu pelatihan berkelanjutan
Dukungan Organisasi	Kebijakan dan kepemimpinan digital	Mulai terbentuk	Mendorong percepatan transformasi layanan
Integrasi Sistem	Interoperabilitas aplikasi	Belum sepenuhnya optimal	Potensi duplikasi pekerjaan administrasi

Sumber: Hasil olah data penelitian berbasis *Systematic Literature Review*, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kesiapan digital aparatur Pemerintah Kota Baubau masih berada pada tahap transisi menuju organisasi digital yang terintegrasi. Literasi digital aparatur menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun belum merata di seluruh perangkat daerah sehingga implementasi SPBE cenderung bergantung pada aparatur yang memiliki kemampuan teknologi lebih tinggi. Kompetensi teknologi aparatur juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan, terutama pada perangkat daerah yang memiliki intensitas penggunaan aplikasi digital yang berbeda. Dukungan organisasi mulai terlihat melalui kebijakan digital dan kepemimpinan yang mendorong penggunaan teknologi, meskipun integrasi sistem SPBE masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

### 3.1.2 Pola Kesiapan Digital Aparatur Pemerintah Daerah

Tabel 3. Pola Kesiapan Digital Aparatur dalam Mendukung SPBE

Pola Temuan	Deskripsi Sintesis	Dampak terhadap Implementasi SPBE
Aparatur Sebagai Aktor Kunci	Tingkat kesiapan individu menentukan keberhasilan sistem	SPBE tidak optimal jika kapasitas SDM rendah
Organisasi sebagai fasilitator	Kebijakan internal mempercepat adopsi teknologi	Transformasi digital lebih stabil
Sistem sebagai enabler	Integrasi aplikasi meningkatkan efisiensi kerja	Mengurangi beban administrasi manual

Sumber: Sintesis penulis dari hasil analisis tematik literatur digital readiness sektor publik, 2025.

Hasil penelitian Tabel 3 menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam implementasi SPBE. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan individu aparatur dalam mengoperasikan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan sistem kerja. Selain itu, organisasi perangkat daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kebijakan dan pelatihan untuk

mendukung kesiapan digital aparatur. Integrasi sistem SPBE menjadi faktor pendukung yang memperkuat kesiapan tersebut karena mampu menyederhanakan proses kerja birokrasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan digital aparatur di Pemerintah Kota Baubau dapat dipahami sebagai konstruksi yang terbentuk dari interaksi antara individu, organisasi, dan sistem digital pemerintahan. Aparatur yang memiliki literasi digital dan kompetensi teknologi yang baik cenderung lebih adaptif terhadap implementasi SPBE. Dukungan organisasi melalui kebijakan dan kepemimpinan digital memperkuat kesiapan tersebut dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi digital. Sementara itu, integrasi sistem SPBE menjadi faktor struktural yang menentukan efektivitas implementasi digital governance di tingkat pemerintahan daerah.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Literasi Digital Aparatur sebagai Fondasi Implementasi SPBE**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital aparatur merupakan fondasi utama dalam mendukung implementasi SPBE di Pemerintah Kota Baubau. Aparatur yang memiliki pemahaman teknologi yang memadai cenderung lebih adaptif dalam menggunakan aplikasi layanan elektronik dan mampu mengurangi ketergantungan pada proses administratif manual. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transformasi digital birokrasi tidak hanya ditentukan oleh pengembangan sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam memahami teknologi tersebut. Dalam konteks pemerintahan daerah, literasi digital berperan sebagai prasyarat awal yang memungkinkan aparatur berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem digital governance.

### **3.2.2 Variasi Kompetensi Teknologi dan Tantangan Adaptasi Aparatur**

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa kompetensi teknologi aparatur masih bervariasi antar perangkat daerah, yang berdampak pada tingkat pemanfaatan sistem SPBE. Aparatur yang memiliki pengalaman teknologi yang lebih tinggi cenderung menjadi pusat operasional dalam penggunaan aplikasi digital, sementara aparatur dengan kemampuan terbatas mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Kondisi ini menegaskan bahwa kesiapan digital aparatur tidak dapat dipandang sebagai kemampuan individu yang seragam, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman kerja dan akses terhadap pelatihan teknologi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas digital perlu difokuskan pada penguatan keterampilan teknis aparatur secara berkelanjutan.

### **3.2.3 Dukungan Organisasi sebagai Faktor Penguat Kesiapan Digital**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dukungan organisasi memiliki peran signifikan dalam memperkuat kesiapan digital aparatur di Pemerintah Kota Baubau. Kebijakan internal yang mendorong penggunaan teknologi serta kepemimpinan digital yang adaptif mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka terhadap inovasi. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada kesiapan individu aparatur, tetapi juga pada komitmen organisasi dalam menyediakan pelatihan, regulasi, dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Dengan kata lain, organisasi perangkat daerah berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan antara kebijakan digital nasional dengan praktik birokrasi lokal.

### **3.2.4 Integrasi Sistem SPBE dan Dampaknya terhadap Efektivitas Kerja Aparatur**

Integrasi sistem SPBE menjadi aspek penting yang memengaruhi kesiapan digital aparatur dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan serta menurunkan efisiensi proses layanan publik. Pembahasan ini mengindikasikan bahwa kesiapan digital aparatur tidak hanya bergantung pada kemampuan individu dan organisasi, tetapi juga pada kualitas desain sistem digital yang digunakan. Oleh karena itu, penguatan interoperabilitas sistem SPBE menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur dan kualitas pelayanan publik.

### **3.2.5 Sintesis Konseptual Digital Readiness Aparatur Pemerintah Kota Baubau**

Secara keseluruhan, pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa digital readiness aparatur Pemerintah Kota Baubau merupakan konstruksi multidimensi yang melibatkan interaksi antara individu, organisasi, dan sistem digital pemerintahan. Literasi digital dan kompetensi teknologi menjadi faktor individu yang menentukan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan SPBE, sementara dukungan organisasi dan integrasi sistem menjadi faktor struktural yang memperkuat kesiapan tersebut. Sintesis ini menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek sumber daya manusia, kebijakan organisasi, dan pengembangan teknologi secara simultan.

## **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa digital readiness aparatur Pemerintah Kota Baubau dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan konstruksi multidimensi yang dipengaruhi oleh kesiapan individu, dukungan organisasi, serta integrasi sistem digital pemerintahan. Literasi digital aparatur menjadi fondasi utama yang menentukan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi, sementara kompetensi teknis berperan dalam memastikan pemanfaatan sistem elektronik berjalan secara efektif. Variasi tingkat kesiapan antarperangkat daerah mengindikasikan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya merata dan masih membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dari perspektif organisasi, dukungan kebijakan internal dan kepemimpinan digital terbukti menjadi faktor penguat yang mendorong aparatur untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja berbasis teknologi. Lingkungan organisasi yang menyediakan pelatihan, regulasi yang jelas, serta komitmen pimpinan terhadap digitalisasi mampu mempercepat proses implementasi SPBE di tingkat operasional. Selain itu, integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi elemen struktural yang memengaruhi efektivitas kerja aparatur, karena sistem yang belum terintegrasi berpotensi menimbulkan duplikasi pekerjaan administratif dan menurunkan efisiensi pelayanan publik.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan digital readiness aparatur sebagai pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi individu, organisasi, dan sistem dalam kerangka digital governance di tingkat pemerintah daerah. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan aparatur sebagai aktor utama dalam transformasi digital birokrasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, peningkatan kompetensi teknologi,

serta pengembangan kebijakan organisasi yang adaptif menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan berkelanjutan di Kota Baubau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M., Liwaul, L., & Saidin, S. (2023). The Ability of Local Government Apparatus Resources In The Implementation of E-Government. *Proceedings of the Regional Seminar on Community Issues, SSIK 2023, 20 September 2023, Kendari, Province of Sulawesi Tenggara, Indonesia*. Proceedings of the Regional Seminar on Community Issues, SSIK 2023, 20 September 2023, Kendari, Province of Sulawesi Tenggara, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2023.2340991>
- Cubo, A., Jose, L. H., Miguel, P., & Benjamin, R. (2022). *Guia de transformaci6n digital del gobierno: Resumen ejecutivo* (Vol. 1).
- Juhaeni, U. (2025). Are We Ready for the Future of Work? HR Strategies for AI Literacy and Digital Competency Development. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 1204–1213. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2122>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 4(2), 134–147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Muallidin, I. (2025). *Bibliometric Analysis of Digital Leadership in Indonesia*. Preprints. <https://doi.org/10.22541/au.175494707.72120285/v1>
- Nafi'ah, B. A. (2022). Challenges of Implementing an Electronic-Based Government System in Local Governments. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10932>
- Palomäki, R. (2020). Julkisen hallinnon haasteita ja mahdollisuuksia digitaalisessa transformaatioissa. *Hallinnon Tutkimus*, 39(3), 173–187. <https://doi.org/10.37450/ht.100036>
- Pasenko, N. (2022). Current Trends in Digital Transformation of Public Administration. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series "Economics,"* 9(2). [https://doi.org/10.52566/10.52566/msu-econ.9\(2\).2022.46-51](https://doi.org/10.52566/10.52566/msu-econ.9(2).2022.46-51)
- Peña Tuanama De, Y. T., Nunt6n More, J. C., Germán Cáceres, M. L., & Heredia Llatas, F. D. (2023). Gobierno electr6nico con enfoque transformacional en la gesti6n p6blica, una revisi6n sistemática. *Revista de Climatología*, 23, 660–668. <https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.660-668>
- Putri, A. D., Hrp, N. I., Marjuwita, V., Rahmi, W. A., Hamiathul, Z., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Digitalisasi Sistem Administrasi Pemerintahan Kota Padang: Analisis Literatur Sistematis. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 3(6), 1000–1007. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i6.2938>
- Rahma Aulia, V., Ramadhani Mukhlis, I., Rahmawati, R., Indayanti Sugata, T. L., Karunia Farista Ananto, P., Rinjeni, T. P., & Sembilu, N. (2025). Mapping SPBE Challenges in Indonesia: Systematic Review by Architecture Domain. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(1), 174–183. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i1.368>
- Setyawan, R., Raharjo, B., & Dewayani, J. (2024). Governance in the Digital Era: Analyzing the Adoption of E-Government Services in Local Authorities Through Quantitative Methods. *Journal of Management and Informatics*, 3(3), 434–450. <https://doi.org/10.51903/jmi.v3i3.54>
- Subhan, S., & Sartika, I. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4648–4656. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1809>
- Syam, A., Sukri, & Hans, A. (2025). E-Government and Digitalization as Catalysts for Organizational Transformation and Public Service Efficiency in Indonesian Local



Governments. *KnE Social Sciences*, 10(18), 1156–1164.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v10i18.19542>

Zain, I., Yunus, M., & Syahribulan. (2025). Digital Governance In Practice: Lessons From The Implementation Of SPBE In North Kalimantan. *International Journal of Environmental Sciences*, 358–372. <https://doi.org/10.64252/31tnqj09>